

Dialektika Politik Islam Di Indonesia

Juhrana Susilo¹, Zasmitha Auliah Wardani², Kurniati³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

e-mail Correspondent: 10200124152@uin-alauddin.co.id, 10200124167@uin-alauddin.co.id, kurniati@uin-alauddin.co.id

Received: 15-04-2026

Revised: 15-05-2026

Accepted: 06-07-2026

Info Artikel

Abstract

Keywords: *Dialectics, Politics, Islam, Indonesia.*

The dialectic of Islamic politics in Indonesia is a phenomenon that demonstrates the dynamic relationship between Islamic values, political power, and national realities in a pluralistic society. This study aims to analyze the development of the dialectic of Islamic politics in Indonesia, the factors influencing it, and its implications for democracy and national life. This study employed library research with a qualitative-descriptive approach. Data were obtained from various sources, such as books, scientific journals, academic articles, official documents, and previous research relevant to the study's theme. Data analysis was conducted using content analysis techniques by reviewing, classifying, interpreting, and summarizing various pieces of information related to the development of Islamic politics in Indonesia. The results show that the dialectic of Islamic politics in Indonesia has been ongoing since the colonial period, the struggle for independence, the era of parliamentary democracy, the Old Order, the New Order, and the Reformation era. This dynamic is characterized by processes of interaction, negotiation, compromise, and contestation between the political aspirations of Muslims and the national political system. Islamic politics in Indonesia has developed in various forms, including through political parties, community organizations, social movements, and community participation in the public sphere. Research findings also indicate that Islamic politics in Indonesia tends to move toward moderation, prioritizing the values of democracy, tolerance, and nationalism without abandoning Islamic principles. On the other hand, the development of information technology and the strengthening of identity politics pose new challenges that influence the interaction between religion and politics in society.

Abstrak

Dialektika politik Islam di Indonesia merupakan fenomena yang menunjukkan hubungan dinamis antara nilai-nilai keislaman, kekuasaan politik, dan realitas kebangsaan dalam masyarakat yang plural. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan dialektika politik Islam di Indonesia, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta implikasinya terhadap kehidupan demokrasi dan kebangsaan. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Data diperoleh dari berbagai sumber pustaka, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dokumen resmi, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema kajian. Analisis data dilakukan melalui teknik content analysis dengan menelaah, mengklasifikasikan,

menginterpretasikan, dan menyimpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan perkembangan politik Islam di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dialektika politik Islam di Indonesia telah berlangsung sejak masa kolonial, masa perjuangan kemerdekaan, era demokrasi parlementer, Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi. Dinamika tersebut ditandai oleh proses interaksi, negosiasi, kompromi, dan kontestasi antara aspirasi politik umat Islam dengan sistem politik nasional. Politik Islam di Indonesia berkembang dalam berbagai bentuk, baik melalui partai politik, organisasi kemasyarakatan, gerakan sosial, maupun partisipasi masyarakat dalam ruang publik. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa politik Islam di Indonesia cenderung bergerak ke arah moderasi dengan mengedepankan nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan kebangsaan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip ajaran Islam. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi dan menguatnya politik identitas menjadi tantangan baru yang memengaruhi pola interaksi antara agama dan politik dalam kehidupan masyarakat.

Kata kunci: Dialektika, Politik, Islam, Indonesia

Pendahuluan

Dialektika politik Islam di Indonesia merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji karena memperlihatkan hubungan yang dinamis antara agama dan kekuasaan dalam konteks negara yang pluralistik. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki sejarah panjang mengenai keterlibatan umat Islam dalam proses politik, mulai dari masa perjuangan kemerdekaan, era demokrasi parlementer, masa Orde Baru, hingga era Reformasi. Dalam setiap fase perkembangan tersebut, Islam tidak hanya hadir sebagai sistem keyakinan dan nilai moral, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi berbagai gerakan sosial, organisasi kemasyarakatan, dan partai politik yang berupaya memperjuangkan aspirasi umat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹ Secara historis, hubungan antara Islam dan politik di Indonesia telah berlangsung sejak masuknya Islam ke Nusantara. Kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, Aceh, Banten, dan Mataram Islam menunjukkan bahwa agama dan kekuasaan memiliki keterkaitan yang erat dalam membangun sistem pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Pada masa kolonial, Islam menjadi salah satu kekuatan utama yang menggerakkan perlawanan terhadap penjajahan melalui berbagai organisasi dan tokoh pergerakan.²

Kehadiran organisasi seperti Sarekat Islam menandai awal munculnya kesadaran politik umat Islam yang lebih terorganisasi dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat pribumi sekaligus menegaskan peran Islam dalam ruang publik. Setelah Indonesia merdeka, perdebatan mengenai posisi Islam dalam negara menjadi salah satu isu penting dalam perumusan dasar negara. Perdebatan antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam mengenai hubungan agama dan negara melahirkan berbagai kompromi politik yang akhirnya menghasilkan Pancasila sebagai dasar negara. Meskipun demikian, aspirasi sebagian kelompok Islam untuk menjadikan syariat Islam sebagai landasan formal negara tetap menjadi bagian dari dinamika politik nasional. Peristiwa penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta sering dipandang sebagai titik awal dialektika politik Islam di Indonesia yang terus berkembang hingga saat ini. Pada era demokrasi parlementer, partai-partai Islam memiliki peran yang cukup signifikan dalam percaturan politik nasional. Kehadiran organisasi politik seperti Masyumi dan Nahdlatul Ulama menunjukkan bahwa umat Islam memiliki basis politik yang kuat.³

¹ Ainun Najib, "Dialektika Politik Hukum Islam Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional," *HUKMY: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2021): 109–31, <https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i1.109-131>.

² Landy Trisna Abdurrahman, "Dialektika Islam Dan Budaya: Studi Kasus Problematika Islam Dan Permasalahan Sosial Politik," *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 10, no. 1 (2023): 129, <https://doi.org/10.14421/inright.v10i1.2920>.

³ Mastori, "Dialektika Pemikiran Dakwah Politik Di Indonesia (Era Refrmasi)," *Jurnal Dakwah* 20, no. 1 (2019): 154–86, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/jurnaldakwah/article/view/1439/1322>.

Namun, perbedaan pandangan mengenai strategi perjuangan politik dan kepentingan kelompok sering kali menimbulkan fragmentasi politik di kalangan umat Islam. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa politik Islam bukanlah entitas yang tunggal, melainkan terdiri atas berbagai corak pemikiran dan orientasi yang beragam. Memasuki masa Orde Baru, hubungan Islam dan negara mengalami perubahan yang cukup signifikan. Pemerintahan Soeharto menerapkan kebijakan depolitisasi terhadap berbagai kekuatan politik, termasuk kelompok Islam. Partai-partai Islam dipaksa melebur ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sementara aktivitas politik yang berlandaskan ideologi keagamaan mendapatkan pengawasan yang ketat. Meskipun demikian, pada akhir masa Orde Baru muncul fenomena akomodasi Islam yang ditandai dengan meningkatnya peran kelompok intelektual Muslim dalam birokrasi dan kehidupan publik. Situasi ini menunjukkan bahwa hubungan Islam dan negara tidak selalu bersifat konfrontatif, tetapi juga dapat berlangsung dalam bentuk kerja sama dan negosiasi politik.

Era Reformasi yang dimulai setelah tumbangnya pemerintahan Soeharto pada tahun 1998 membuka ruang yang lebih luas bagi ekspresi politik Islam. Demokratisasi memungkinkan lahirnya berbagai partai politik berbasis Islam dan munculnya gerakan-gerakan keagamaan yang aktif dalam ruang publik. Kebebasan politik yang semakin terbuka menjadikan Islam sebagai salah satu kekuatan sosial-politik yang berpengaruh dalam proses demokrasi Indonesia. Pada periode ini, partai-partai Islam berusaha memperjuangkan agenda politiknya melalui mekanisme demokrasi, meskipun dukungan elektoral yang diperoleh cenderung fluktuatif dan tidak selalu mencerminkan besarnya jumlah penduduk Muslim di Indonesia. Dalam konteks kontemporer, dialektika politik Islam semakin kompleks seiring dengan perkembangan globalisasi, teknologi informasi, dan media sosial. Kemajuan teknologi komunikasi telah mengubah pola partisipasi politik masyarakat dan memperluas ruang dakwah serta mobilisasi politik berbasis agama. Berbagai isu keagamaan dengan cepat menyebar melalui media digital dan sering kali memengaruhi preferensi politik masyarakat. Di sisi lain, perkembangan tersebut juga menimbulkan tantangan berupa polarisasi politik, penyebaran disinformasi, serta menguatnya politik identitas yang berpotensi mengganggu kohesi sosial dalam masyarakat yang majemuk.⁴

Politik Islam di Indonesia juga tidak dapat dilepaskan dari peran organisasi-organisasi Islam besar seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang selama ini berkontribusi dalam pembangunan bangsa melalui pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Kedua organisasi tersebut umumnya menampilkan wajah Islam moderat yang menekankan nilai-nilai toleransi, demokrasi, dan kebangsaan. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa hubungan antara Islam dan politik tidak selalu diwujudkan melalui partai politik, tetapi juga melalui berbagai bentuk partisipasi sosial yang mendukung penguatan masyarakat sipil. Secara teoretis, dialektika politik Islam di Indonesia dapat dipahami sebagai proses interaksi, negosiasi, dan adaptasi antara nilai-nilai keislaman dengan realitas sosial-politik yang plural. Perspektif hubungan agama dan negara menunjukkan bahwa Islam memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan sistem demokrasi modern tanpa kehilangan identitas normatifnya. Dalam konteks Indonesia, proses tersebut menghasilkan berbagai model relasi antara agama dan negara yang unik, yaitu tidak sepenuhnya sekuler dan tidak pula berbentuk negara agama.⁵

Model ini memungkinkan terjadinya integrasi antara nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip kebangsaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, dialektika

⁴ Zuhri Humaidi, "Dialektika Islam Politik Dan Nasionalisme: Analisis Restrospektif," *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, no. Series 2 (2018): 889–903, <http://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancoms/article/view/189>.

⁵ Miftakhur Ridlo, "Dialektika Sunni Dan Sy i ' Ah Dalam Pemikiran Politik Islam Menarik Yang Sampai Saat Ini Disinggung Secara Mendalam . Hal Ini Dipicu Dinamika Dalam," *Ayy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 (2022): 50–64, <https://doi.org/https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i2.846https>.

politik Islam di Indonesia merupakan proses yang terus berkembang dan dipengaruhi oleh faktor historis, sosial, budaya, serta politik. Dinamika tersebut menunjukkan bahwa Islam memiliki peran penting dalam membentuk arah kehidupan politik nasional, sekaligus menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga keseimbangan antara aspirasi keagamaan, demokrasi, dan pluralisme. Oleh karena itu, kajian mengenai dialektika politik Islam menjadi penting untuk memahami bagaimana nilai-nilai Islam berinteraksi dengan sistem politik modern serta bagaimana kontribusinya dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, adil, dan harmonis. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji secara mendalam berbagai bentuk dialektika politik Islam di Indonesia, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta implikasinya terhadap perkembangan demokrasi dan kehidupan kebangsaan di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *library research* (studi kepustakaan) dengan pendekatan *kualitatif-deskriptif*. Metode ini dipilih karena kajian mengenai dialektika politik Islam di Indonesia memerlukan penelaahan mendalam terhadap berbagai literatur yang membahas hubungan antara Islam dan politik dalam konteks sejarah, sosial, dan ketatanegaraan Indonesia. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber ilmiah yang relevan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika politik Islam di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah **pendekatan normatif-teologis, historis, dan sosio-politik**. Pendekatan normatif-teologis digunakan untuk memahami konsep-konsep politik dalam perspektif Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta pemikiran para ulama dan cendekiawan Muslim. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan politik Islam sejak masa pergerakan nasional, masa kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi. Sementara itu, pendekatan sosio-politik digunakan untuk menganalisis interaksi antara nilai-nilai Islam dengan realitas politik, demokrasi, dan kehidupan masyarakat Indonesia yang pluralistik.⁶

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari berbagai karya ilmiah yang secara khusus membahas politik Islam, demokrasi, hubungan agama dan negara, serta perkembangan partai politik Islam di Indonesia. Adapun data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, hasil penelitian terdahulu, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, serta berbagai sumber pustaka lain yang relevan dengan fokus penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, membaca, mencatat, mengklasifikasikan, dan mengorganisasikan berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan tema penelitian. Selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik **analisis isi** (*content analysis*). Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, kategorisasi data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi informasi yang relevan dengan fokus penelitian.⁷

Tahap kategorisasi dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan tema-tema tertentu, seperti relasi agama dan negara, perkembangan partai politik Islam, politik identitas, demokrasi, serta kontribusi Islam dalam kehidupan politik Indonesia. Selanjutnya, data diinterpretasikan secara kritis untuk menemukan pola, hubungan, dan dinamika yang muncul dalam dialektika politik Islam di Indonesia. Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi yang berasal

⁶ Ferki Ahmad Marlion, Kamaluddin Kamaluddin, and Putri Rezeki, "Tasybih At-Tamtsil Dalam Al-Qur'an: Analisis Balaghah Pada Surah Al-Kahfi," *Lughawiyah: Journal of Arabic Education and Linguistics* 3, no. 1 (2021): 33, <https://doi.org/10.31958/lughawiyah.v3i1.3210>.

⁷ Masripah Masripah, Akbar Al Firdaus, and Herdi Firmansyah, "Membangun Solidaritas Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an Prinsip Ukhuwah Islamiyah," *Action Research Journal Indonesia (ARJI)* 7, no. 1 (2025): 349–64, <https://doi.org/10.61227/arji.v7i1.283>.

dari buku, jurnal, hasil penelitian, dan dokumen resmi yang memiliki relevansi dengan topik kajian. Melalui metode tersebut, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai dialektika politik Islam di Indonesia serta memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian politik Islam dalam konteks masyarakat demokratis dan plural.⁸

Hasil dan Pembahasan

A. Dialektika

Dialektika merupakan suatu konsep pemikiran yang menggambarkan proses interaksi, pertentangan, dan penyatuan berbagai gagasan, nilai, atau kepentingan yang berbeda untuk menghasilkan pemahaman atau kondisi baru yang lebih berkembang. Secara etimologis, istilah dialektika berasal dari bahasa Yunani *dialektike*, yang berarti seni berdialog atau berdiskusi untuk menemukan kebenaran. Dalam perkembangannya, dialektika tidak hanya dipahami sebagai metode berpikir, tetapi juga sebagai cara memahami perubahan sosial, politik, budaya, dan keagamaan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Dalam tradisi filsafat, dialektika sering dikaitkan dengan pemikiran para filsuf Yunani seperti Socrates dan Plato yang menggunakan metode tanya jawab untuk menguji argumentasi dan menemukan hakikat suatu persoalan. Konsep ini kemudian dikembangkan oleh Georg Wilhelm Friedrich Hegel yang memandang bahwa perkembangan sejarah dan pemikiran manusia berlangsung melalui proses tesis, antitesis, dan sintesis. Tesis merupakan suatu gagasan atau kondisi yang telah mapan, antitesis adalah gagasan yang muncul sebagai bentuk kritik atau perlawanan terhadap tesis, sedangkan sintesis merupakan hasil perpaduan keduanya yang melahirkan bentuk pemikiran baru.⁹

Dengan demikian, dialektika menjadi mekanisme yang menjelaskan bagaimana perubahan dan perkembangan terjadi secara dinamis dalam kehidupan manusia. Dalam konteks sosial dan politik, dialektika menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara berbagai kelompok, ideologi, maupun kepentingan yang saling memengaruhi. Perbedaan pandangan yang muncul dalam masyarakat tidak selalu berujung pada konflik, tetapi dapat menjadi sarana untuk menghasilkan kesepakatan, inovasi, dan transformasi sosial. Melalui proses dialektis, masyarakat dapat menemukan titik temu di tengah keberagaman sehingga tercipta tatanan sosial yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dalam kajian Islam, dialektika dapat dipahami sebagai proses interaksi antara ajaran normatif agama dengan realitas sosial yang terus berkembang. Islam sebagai agama yang memiliki nilai-nilai universal senantiasa berdialog dengan berbagai perubahan zaman, budaya, dan kondisi masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman keagamaan tidak terlepas dari proses interpretasi dan penyesuaian terhadap konteks yang dihadapi umat.¹⁰

Dialektika dalam Islam terlihat pada upaya para ulama dan cendekiawan Muslim dalam merumuskan berbagai pemikiran keislaman yang relevan dengan tantangan sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang terus berubah. Dalam konteks Indonesia, dialektika tampak pada hubungan antara Islam, negara, dan masyarakat. Berbagai gagasan mengenai penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa terus mengalami proses negosiasi dan penyesuaian dengan prinsip demokrasi, pluralisme, serta kebhinekaan yang menjadi karakter bangsa Indonesia. Melalui proses dialektika tersebut, lahir berbagai bentuk pemikiran dan praktik politik yang berusaha mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan semangat kebangsaan. Dengan demikian, dialektika

⁸ Ida Safitri, Sufyarma Marsidin, and Ahmad Subandi, "Analisis Kebijakan Terkait Kebijakan Literasi Digital Di Sekolah Dasar," *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 2, no. 2 (2020): 176–80, <https://doi.org/10.31004/edukatif.v2i2.123>.

⁹ Salman Luthan, "Dialektika Hukum Dan Moral Dalam Perspektif Filsafat Hukum," *Dialektika Hukum Dan Moral Dalam Perspektif Filsafat Hukum* 4, no. 4 (2012): 1–18, <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4488/3963>.

¹⁰ Mustaqim Pabbajah, "Dialektika Islam Dan Budaya Lokal: Strategi Bertahan Komunitas Bawakaraeng Sulawesi Selatan," *Dialektika: Jurnal Pemikiran Islam Dan Ilmu Sosial* 13, no. 01 (2020): 38–52, <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4488/3963>.

tidak hanya menjadi konsep teoritis, tetapi juga menjadi realitas yang terus berlangsung dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat Indonesia.

B. Politik Islam

Politik Islam merupakan kajian yang membahas hubungan antara ajaran Islam dengan kekuasaan, pemerintahan, serta berbagai aktivitas politik yang dilakukan oleh umat Islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam perspektif Islam, politik tidak hanya dipahami sebagai upaya memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan, kesejahteraan, dan ketertiban sosial sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh agama. Oleh karena itu, politik Islam memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan politik dalam pengertian konvensional, karena mencakup aspek moral, etika, dan tanggung jawab spiritual dalam penyelenggaraan kehidupan publik. Secara etimologis, istilah politik dalam tradisi Islam sering dikaitkan dengan konsep *siyāsah*, yang berarti mengatur, mengelola, atau mengurus urusan masyarakat. Konsep ini menegaskan bahwa kekuasaan dalam Islam bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Dalam pandangan para ulama klasik, politik Islam dipahami sebagai segala bentuk kebijakan yang bertujuan menjaga agama (*hifẓ al-dīn*), melindungi jiwa (*hifẓ al-nafs*), menjaga akal (*hifẓ al-'aql*), melindungi keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan menjaga harta (*hifẓ al-māl*). Kelima prinsip tersebut dikenal sebagai *maqāṣid al-syarī'ah* yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan sosial.¹¹

Dasar-dasar politik Islam bersumber dari Al-Qur'an dan hadis yang memuat berbagai prinsip mengenai kepemimpinan, musyawarah, keadilan, persamaan, amanah, serta tanggung jawab penguasa terhadap rakyat. Salah satu prinsip penting dalam politik Islam adalah *syūrā* (musyawarah), yaitu proses pengambilan keputusan melalui konsultasi dan pertimbangan bersama. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam mengakui pentingnya partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya keadilan sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an yang memerintahkan umat Islam untuk berlaku adil kepada siapa pun tanpa membedakan latar belakang suku, agama, maupun status sosial. Dalam perkembangan sejarah Islam, politik memiliki peran yang sangat penting dalam membangun peradaban. Sejak masa Nabi Muhammad SAW di Madinah, Islam telah menunjukkan bahwa agama dan kehidupan sosial-politik memiliki hubungan yang erat.¹²

Nabi tidak hanya berperan sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai pemimpin masyarakat yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum, ekonomi, keamanan, dan hubungan antar kelompok masyarakat. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, sistem pemerintahan Islam dilanjutkan oleh para Khulafaur Rasyidin yang berusaha menjalankan kepemimpinan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab moral. Dalam konteks modern, politik Islam mengalami perkembangan yang beragam sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan sistem politik di masing-masing negara. Sebagian kelompok memandang bahwa Islam harus menjadi dasar formal negara dan hukum pemerintahan, sementara

¹¹ MUTIARA FAHMI, "The Basic Principles of Islamic Political Law in the Perspective of the Quran," *Petita : Journal of Law and Sharia Studies* 2, no. 1 (2017): 47, <https://petita.ar-raniry.ac.id/index.php/petita/article/view/59/42>.

¹² Hisam Ahyani and Elah Nurhasanah, "Peran Strategi Politik Islam Terhadap Perekonomian Di Indonesia," *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2020): 18–43, <https://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasith/article/view/185/141>.

kelompok lainnya berpendapat bahwa nilai-nilai Islam dapat diwujudkan melalui sistem demokrasi tanpa harus menjadikan negara berbentuk negara agama.¹³

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa politik Islam bukanlah konsep yang tunggal, melainkan memiliki berbagai corak pemikiran dan pendekatan yang berkembang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan zaman. Di Indonesia, politik Islam memiliki sejarah panjang yang tidak terlepas dari perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia menjadi ruang bagi berkembangnya berbagai pemikiran politik Islam, baik melalui organisasi keagamaan, partai politik, maupun gerakan sosial kemasyarakatan. Politik Islam di Indonesia umumnya berkembang dalam kerangka negara Pancasila yang menjunjung tinggi demokrasi, toleransi, dan pluralisme. Dalam konteks ini, umat Islam berupaya mengaktualisasikan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan publik tanpa mengabaikan keberagaman masyarakat Indonesia. Dengan demikian, politik Islam dapat dipahami sebagai proses pengelolaan kehidupan masyarakat dan negara berdasarkan nilai-nilai yang bersumber dari ajaran Islam. Politik Islam tidak hanya berorientasi pada perebutan kekuasaan, tetapi juga menekankan terwujudnya keadilan, kesejahteraan, kemaslahatan, dan etika dalam kehidupan publik. Oleh karena itu, politik Islam memiliki peran strategis dalam membangun tatanan sosial yang harmonis, demokratis, dan berkeadaban, serta menjadi sarana bagi umat Islam untuk mengimplementasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

C. Dialektika Politik Islam Di Indonesia

Dialektika politik Islam di Indonesia merupakan salah satu fenomena sosial-politik yang paling menarik untuk dikaji karena melibatkan hubungan yang kompleks antara agama, negara, masyarakat, dan kekuasaan. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki pengalaman yang unik dalam membangun relasi antara Islam dan politik. Keunikan tersebut terletak pada kenyataan bahwa meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, Indonesia tidak mendeklarasikan diri sebagai negara Islam, melainkan sebagai negara yang berlandaskan Pancasila. Pilihan ini kemudian melahirkan berbagai bentuk interaksi, negosiasi, kompromi, dan kontestasi yang berlangsung secara terus-menerus dalam kehidupan politik nasional. Proses tersebut dikenal sebagai dialektika politik Islam, yaitu hubungan dinamis antara nilai-nilai keislaman dengan sistem politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Dalam perspektif historis, akar dialektika politik Islam dapat ditelusuri sejak masuknya Islam ke Nusantara pada abad ke-13. Islam tidak hanya berkembang sebagai agama yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga menjadi sistem nilai yang memengaruhi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik masyarakat.¹⁴

Berdirinya kerajaan-kerajaan Islam seperti Kesultanan Aceh, Demak, Banten, Cirebon, Ternate, dan Tidore menunjukkan bahwa Islam memiliki kontribusi besar dalam pembentukan sistem pemerintahan dan struktur sosial masyarakat Nusantara. Pada masa tersebut, agama dan politik merupakan dua unsur yang saling terkait dalam membangun legitimasi kekuasaan dan menjaga stabilitas sosial. Pada masa kolonial, Islam menjadi kekuatan ideologis yang mendorong lahirnya gerakan perlawanan terhadap penjajah. Para ulama, santri, dan tokoh Muslim memainkan peran penting dalam membangkitkan kesadaran masyarakat untuk memperjuangkan kemerdekaan. Perlawanan yang dipimpin oleh tokoh-tokoh Islam di berbagai daerah memperlihatkan bahwa agama tidak hanya menjadi sumber spiritualitas, tetapi juga menjadi sumber motivasi politik. Dalam perkembangan berikutnya, muncul berbagai organisasi Islam modern yang tidak hanya bergerak

¹³ Iain Sultan and Amai Gorontalo, "Kepemimpinan Dalam Perspektif Pemikiran Politik Islam," *Rivew Politik* 02 (2012): 1–15, <https://jurnalfuf.uinsa.ac.id/index.php/JRP/article/view/1001>.

¹⁴ Moh. Anas Kholish and Yulianto, "Dialektika Pemikiran Islam Dan Demokrasi Manhaj Indonesia: Sebuah Potret Historisitas, Kontinuitas, Dan Perubahan," *Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai Dan Pembangunan Karakter* 2, no. 2 (2018), <https://waskita.ub.ac.id/index.php/waskita/article/view/36>.

dalam bidang dakwah dan pendidikan, tetapi juga terlibat dalam perjuangan politik kebangsaan. Kehadiran Sarekat Islam menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah politik Islam Indonesia karena organisasi ini berhasil mengintegrasikan kesadaran keagamaan dengan kesadaran nasionalisme.¹⁵

Ketika Indonesia memasuki masa persiapan kemerdekaan, perdebatan mengenai hubungan Islam dan negara menjadi isu yang sangat penting. Sebagian tokoh Islam berpendapat bahwa karena mayoritas rakyat Indonesia beragama Islam, maka negara seharusnya memberikan posisi yang lebih kuat bagi syariat Islam dalam sistem ketatanegaraan. Di sisi lain, kelompok nasionalis beranggapan bahwa negara harus dibangun di atas fondasi yang mampu mengakomodasi seluruh golongan masyarakat tanpa membedakan agama dan latar belakang budaya. Perdebatan tersebut menghasilkan kompromi politik yang menjadi fondasi lahirnya negara Indonesia. Kompromi ini menunjukkan bahwa sejak awal berdirinya bangsa, hubungan antara Islam dan negara telah dibangun melalui proses dialog dan negosiasi yang panjang. Setelah kemerdekaan, dialektika politik Islam memasuki fase baru melalui keterlibatan partai-partai Islam dalam sistem demokrasi parlementer. Pada periode ini, partai-partai Islam memiliki posisi yang cukup kuat dan berusaha memperjuangkan aspirasi umat melalui jalur konstitusional. Kehadiran Masyumi sebagai salah satu partai terbesar menunjukkan besarnya pengaruh politik umat Islam pada masa awal kemerdekaan. Namun, perbedaan pandangan mengenai strategi perjuangan dan orientasi politik menyebabkan munculnya fragmentasi di kalangan kekuatan politik Islam.¹⁶

Fragmentasi tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas perjuangan politik umat Islam dalam memperjuangkan agenda-agenda politiknya. Memasuki era Demokrasi Terpimpin dan kemudian Orde Baru, hubungan Islam dan negara mengalami perubahan yang cukup signifikan. Pemerintah berupaya mengendalikan berbagai kekuatan politik yang dianggap berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Akibatnya, ruang gerak politik Islam formal menjadi semakin terbatas. Meski demikian, kondisi tersebut tidak menyebabkan Islam kehilangan pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya, umat Islam mengembangkan berbagai strategi baru melalui jalur pendidikan, dakwah, organisasi sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Pada masa inilah organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama semakin menunjukkan perannya sebagai kekuatan masyarakat sipil yang berpengaruh dalam pembangunan bangsa. Pada penghujung masa Orde Baru, muncul fenomena yang dikenal sebagai akomodasi Islam. Pemerintah mulai membuka ruang yang lebih luas bagi umat Islam untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan publik.¹⁷

Banyak tokoh Muslim mulai menduduki posisi strategis dalam pemerintahan, birokrasi, dan lembaga-lembaga negara. Fenomena ini menunjukkan bahwa hubungan antara Islam dan negara tidak selalu ditandai oleh konflik, tetapi juga dapat berkembang dalam bentuk kerja sama yang saling menguntungkan. Dalam konteks ini, dialektika politik Islam bergerak dari pola konfrontatif menuju pola akomodatif. Era Reformasi tahun 1998 menjadi titik balik yang sangat penting dalam perkembangan politik Islam di Indonesia. Reformasi membuka ruang demokrasi yang lebih luas dan memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengekspresikan aspirasi politiknya. Berbagai partai politik berbasis Islam bermunculan dan ikut berkompetisi dalam

¹⁵ Edi Susanto, "Islam Pribumi versus Islam Otentik (Dialektika Islam Universal Dengan Partikularitas Budaya Lokal)," *Karsa: Jurnal Sosial Dan Budaya KeIslaman* 13, no. 1 (2008): 16–24, <https://ejournal.uinmadura.ac.id/index.php/karsa/article/view/128/119>.

¹⁶ Zakaria Sya'fi, "Dialektika Hukum Islam Di Indonesia," *Alqalam* 25, no. 1 (2008): 65, <https://doi.org/10.32678/alqalam.v25i1.1673>.

¹⁷ Studi Historis dan Terhadap Perkembangannya, "Dialektika Hukum Islam Dan Modernitas Global," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2026, 3324–34, <https://ejournal.yayasanpendidikanzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/3625/2249>.

pemilihan umum. Namun demikian, realitas politik menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah partai Islam tidak selalu diikuti oleh meningkatnya dukungan elektoral. Banyak pemilih Muslim justru memberikan dukungannya kepada partai-partai nasionalis yang dianggap lebih mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa perilaku politik masyarakat Indonesia tidak semata-mata ditentukan oleh identitas keagamaan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kepemimpinan, program kerja, dan isu kesejahteraan.¹⁸

Dalam perkembangan kontemporer, dialektika politik Islam semakin dipengaruhi oleh globalisasi, demokratisasi, dan revolusi teknologi informasi. Media sosial telah menjadi arena baru bagi pertarungan gagasan politik dan keagamaan. Berbagai kelompok Islam memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan ideologi, membangun jaringan, dan memobilisasi dukungan politik. Perkembangan ini memberikan peluang yang besar bagi penguatan partisipasi politik masyarakat. Namun di sisi lain, media digital juga menjadi ruang yang rentan terhadap penyebaran hoaks, ujaran kebencian, radikalisme, dan polarisasi politik yang memanfaatkan sentimen keagamaan. Fenomena politik identitas yang menguat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa agama masih memiliki daya mobilisasi yang sangat besar dalam kehidupan politik Indonesia. Agama sering digunakan sebagai instrumen untuk memperoleh dukungan politik, membangun solidaritas kelompok, maupun memengaruhi pilihan politik masyarakat. Di satu sisi, hal ini menunjukkan bahwa agama tetap memiliki relevansi yang kuat dalam ruang publik.¹⁹

Namun di sisi lain, penggunaan agama secara berlebihan dalam politik dapat menimbulkan eksklusivisme, polarisasi sosial, dan melemahnya kohesi nasional apabila tidak dikelola secara bijaksana. Dalam konteks demokrasi Indonesia, dialektika politik Islam memperlihatkan adanya upaya terus-menerus untuk menemukan titik keseimbangan antara identitas keagamaan dan identitas kebangsaan.²⁰ Sebagian kelompok menginginkan penerapan nilai-nilai Islam secara lebih formal dalam sistem hukum dan pemerintahan, sementara kelompok lainnya lebih menekankan substansi nilai-nilai Islam seperti keadilan, kejujuran, amanah, persamaan, dan kesejahteraan sosial tanpa harus mengubah bentuk negara. Perbedaan pandangan tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang menunjukkan keberagaman pemikiran politik di kalangan umat Islam Indonesia. Secara teoretis, dialektika politik Islam di Indonesia mencerminkan proses interaksi yang berkelanjutan antara teks keagamaan, interpretasi ulama, realitas sosial, dan kebutuhan politik masyarakat. Hubungan tersebut tidak pernah berhenti pada satu bentuk tertentu, melainkan terus berkembang mengikuti perubahan zaman.²¹

Oleh karena itu, politik Islam di Indonesia tidak dapat dipahami sebagai konsep yang statis, melainkan sebagai fenomena yang selalu mengalami transformasi sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang terjadi dalam masyarakat. Pada akhirnya, dialektika politik Islam di Indonesia menunjukkan bahwa Islam dan demokrasi bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Pengalaman Indonesia justru memperlihatkan bahwa nilai-nilai Islam dapat hidup berdampingan dengan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan pluralisme dalam kerangka negara Pancasila. Tantangan ke depan adalah bagaimana menjadikan politik Islam sebagai

¹⁸ Satryo Pringgo Sejati and Ahmad Burhan Hakim, "Islam Dan Demokrasi Di Indonesia : Dialektika Agama , Kekuasaan Dan Persoalan Moderasi Beragama," *JOSH (Journal of Sharia)* 05 (2026): 41–49, <https://ejournal.unsuda.ac.id/index.php/josh/article/view/2464/1286>.

¹⁹ Teddy Khumaedi, "Dialektika Agama Dalam Komunikasi Politik Menjelang Pilpres Tahun 2024 Dialectics Of Religion In Political Communication Ahead Of The 2024 Presidential Election," *Lisyabab Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 5, no. 1 (2024): 2722–8096, <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v5i1.238>.

²⁰ Marzuki et al., "Propaganda in Political Campaign Strategies: The Dialectic of Political Morality and Substantive Democracy in the Context of Elections in Indonesia," *Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 5, no. 1 (2025), <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Staatsrecht/article/view/4399/2338>.

²¹ Jurnal Sibali-parriq, "Dialektika Hukum Islam Dan Perubahan Sosial, Ekonomi Dan Politik," *Jurnal Sibali-parriq* 1, no. 1 (2024): 12–31, <https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/sibali-parriq/article/view/1278/632>.

sarana untuk memperkuat keadilan, memperluas kesejahteraan, membangun etika publik, serta menjaga persatuan bangsa di tengah keberagaman. Dengan demikian, dialektika politik Islam tidak hanya menjadi bagian dari sejarah politik Indonesia, tetapi juga menjadi faktor penting dalam menentukan arah masa depan demokrasi dan kehidupan kebangsaan Indonesia.

Kesimpulan

Dialektika politik Islam di Indonesia merupakan proses historis dan sosial yang berlangsung secara dinamis melalui interaksi antara nilai-nilai Islam, sistem politik, dan realitas kebangsaan yang plural. Sejak masa kolonial hingga era Reformasi, politik Islam telah mengalami berbagai bentuk perkembangan yang ditandai oleh proses negosiasi, adaptasi, kompromi, dan kontestasi dalam upaya mengintegrasikan aspirasi keislaman dengan kepentingan nasional. Dinamika tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya berfungsi sebagai ajaran keagamaan, tetapi juga sebagai sumber nilai yang memengaruhi kehidupan sosial dan politik masyarakat Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa hubungan antara Islam dan negara di Indonesia tidak berkembang dalam pola yang bersifat konfrontatif maupun sekuler secara mutlak, melainkan melalui model relasi yang moderat dan akomodatif. Pancasila sebagai dasar negara menjadi titik temu yang memungkinkan nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip kebangsaan berjalan secara harmonis dalam kehidupan bernegara. Dalam perkembangannya, politik Islam diwujudkan melalui berbagai saluran, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, gerakan sosial, dan partisipasi aktif umat Islam dalam ruang publik. Selain itu, perkembangan demokrasi dan kemajuan teknologi informasi telah memperluas ruang ekspresi politik Islam sekaligus menghadirkan tantangan baru berupa politik identitas, polarisasi sosial, dan penyebaran informasi yang berpotensi memengaruhi stabilitas kehidupan berbangsa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan nilai-nilai Islam yang moderat, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama agar politik Islam dapat terus berkontribusi secara positif terhadap pembangunan demokrasi dan penguatan persatuan nasional. Dengan demikian, dialektika politik Islam di Indonesia menunjukkan bahwa nilai-nilai keislaman dapat berjalan selaras dengan demokrasi, pluralisme, dan semangat kebangsaan. Keberhasilan politik Islam tidak semata-mata diukur dari keberhasilan memperoleh kekuasaan politik, tetapi dari kemampuannya menghadirkan keadilan, kesejahteraan, toleransi, dan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, politik Islam di Indonesia memiliki peran strategis dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, harmonis, dan berkeadilan di tengah keberagaman yang menjadi karakter utama bangsa Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Landy Trisna. "Dialektika Islam Dan Budaya: Studi Kasus Problematika Islam Dan Permasalahan Sosial Politik." *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 10, no. 1 (2023): 129. <https://doi.org/10.14421/inright.v10i1.2920>.
- Ahyani, Hisam, and Elah Nurhasanah. "Peran Strategi Politik Islam Terhadap Perekonomian Di Indonesia." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2020): 18–43. <https://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasith/article/view/185/141>.
- FAHMI, MUTIARA. "The Basic Principles of Islamic Political Law in the Perspective of the Quran." *Petita : Journal of Law and Sharia Studies* 2, no. 1 (2017): 47. <https://petita.ar-raniry.ac.id/index.php/petita/article/view/59/42>.
- Historis, Studi, and Terhadap Perkembangannya. "Dialektika Hukum Islam Dan Modernitas Global." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2026, 3324–34. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/3625/2249>.
- Humaidi, Zuhri. "Dialektika Islam Politik Dan Nasionalisme: Analisis Restrospektif." *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, no. Series 2 (2018): 889–903.

- <http://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancoms/article/view/189>.
- Kholish, Moh. Anas, and Yulianto. "Dialektika Pemikiran Islam Dan Demokrasi Manhaj Indonesia: Sebuah Potret Historisitas, Kontinuitas, Dan Perubahan." *Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai Dan Pembangunan Karakter* 2, no. 2 (2018).
<https://waskita.ub.ac.id/index.php/waskita/article/view/36>.
- Khumaedi, Teddy. "Dialektika Agama Dalam Komunikasi Politik Menjelang Pilpres Tahun 2024 Dialectics Of Religion In Political Communication Ahead Of The 2024 Presidential Election." *Lisyabab Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 5, no. 1 (2024): 2722–8096.
<https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v5i1.238>.
- Luthan, Salman. "Dialektika Hukum Dan Moral Dalam Perspektif Filsafat Hukum." *Dialektika Hukum Dan Moral Dalam Perspektif Filsafat Hukum* 4, no. 4 (2012): 1–18.
<https://journal.uin.ac.id/IUSTUM/article/view/4488/3963>.
- Marlion, Ferki Ahmad, Kamaluddin Kamaluddin, and Putri Rezeki. "Tasybih At-Tamtsil Dalam Al-Qur'an: Analisis Balaghah Pada Surah Al-Kahfi." *Lughawiyah: Journal of Arabic Education and Linguistics* 3, no. 1 (2021): 33. <https://doi.org/10.31958/lughawiyah.v3i1.3210>.
- Marzuki, Thorieq Al Abdu, Ayu Wantika, Andre Selamat Sinaga, and Juni Yanti Siagian. "Propaganda in Political Campaign Strategies: The Dialectic of Political Morality and Substantive Democracy in the Context of Elections in Indonesia." *Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 5, no. 1 (2025). <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Staatsrecht/article/view/4399/2338>.
- Masripah, Masripah, Akbar Al Firdaus, and Herdi Firmansyah. "Membangun Solidaritas Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an Prinsip Ukhuwah Islamiyah." *Action Research Journal Indonesia (ARJI)* 7, no. 1 (2025): 349–64. <https://doi.org/10.61227/arji.v7i1.283>.
- Mastori. "Dialektika Pemikiran Dakwah Politik Di Indonesia (Era Refrmasi)." *Jurnal Dakwah* 20, no. 1 (2019): 154–86. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/jurnaldakwah/article/view/1439/1322>.
- Najib, Ainun. "Dialektika Politik Hukum Islam Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional." *HUKMY: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2021): 109–31.
<https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i1.109-131>.
- Pabbajah, Mustaqim. "Dialektika Islam Dan Budaya Lokal: Strategi Bertahan Komunitas Bawakaraeng Sulawesi Selatan." *Dialektika: Jurnal Pemikiran Islam Dan Ilmu Sosial* 13, no. 01 (2020): 38–52. <https://journal.uin.ac.id/IUSTUM/article/view/4488/3963>.
- Ridlo, Miftakhur. "Dialektika Sunni Dan Sy i ' Ah Dalam Pemikiran Politik Islam Menarik Yang Sampai Saat Ini Disinggung Secara Mendalam . Hal Ini Dipicu Dinamika Dalam." *Ay-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 (2022): 50–64.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i2.846https>.
- Safitri, Ida, Sufyarma Marsidin, and Ahmad Subandi. "Analisis Kebijakan Terkait Kebijakan Literasi Digital Di Sekolah Dasar." *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 2, no. 2 (2020): 176–80.
<https://doi.org/10.31004/edukatif.v2i2.123>.
- Sejati, Satryo Pringgo, and Ahmad Burhan Hakim. "Islam Dan Demokrasi Di Indonesia : Dialektika Agama , Kekuasaan Dan Persoalan Moderasi Beragama." *JOSH (Journal of Sharia)* 05 (2026): 41–49. <https://ejournal.unsuda.ac.id/index.php/josh/article/view/2464/1286>.
- Sibaliparriq, Jurnal. "Dialektika Hukum Islam Dan Perubahan Sosial, Ekonomi Dan Politik." *Jurnal Sibaliparriq* 1, no. 1 (2024): 12–31.
<https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/sibaliparriq/article/view/1278/632>.
- Sultan, Iain, and Amai Gorontalo. "Kepemimpinan Dalam Perspektif Pemikiran Politik Islam." *Rivew Politik* 02 (2012): 1–15.
<https://jurnalfuf.uinsa.ac.id/index.php/JRP/article/view/1001>.
- Susanto, Edi. "Islam Pribumi versus Islam Otentik (Dialektika Islam Universal Dengan Partikularitas Budaya Lokal)." *Karsa: Jurnal Sosial Dan Budaya Kelslaman* 13, no. 1 (2008): 16–24. <https://ejournal.uinmadura.ac.id/index.php/karsa/article/view/128/119>.

Syafe'i, Zakaria. "Dialektika Hukum Islam Di Indonesia." *Alqalam* 25, no. 1 (2008): 65.
<https://doi.org/10.32678/alqalam.v25i1.1673>.